

**KERJASAMA PEMERINTAH NANGGROE ACEH DARUSSALAM
(NAD) DENGAN BANK DUNIA DALAM PROGRAM *CONSOLIDATING
PEACEFUL DEVELOPMENT IN ACEH*
2009-2013**

Oleh:

Yenni Sari Devi

Email : yennisaridevi@gmail.com

Pembimbing: Drs. Syafri Harto, M.Si

**Bibliografi : : (+76) halaman (2 gambar + 4 tabel) + 20 referensi (14
buku + 1 jurnal + 4 website)**

Jurusan Ilmu Hubungan Internasional – Prodi Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik

Universitas Riau

Kampus bina widya jl. H.R. Soebrantas Km. 12,5 Simp. Baru Pekanbaru
28293- Telp/Fax. 0761-63277

ABSTRACT

This study will analyze about the Nanggroe Aceh Darussalam government cooperation with the World Bank in the program Consolidating Peaceful Development in Aceh 2009-2013. Assistance from the World Bank in the pack in CPDA program to the Government of NAD is an expression of solidarity and sympathy to the tsunami and the conflict that hit Aceh GAM ago.

The process of cooperation between the Government of NAD with the World Bank in the program Consolidating Peaceful Development in Aceh realization is realized with improved aid development planning and management of public funds by the principle that break the cycle of violence in conflict areas in need of development and has a strong institutional legitimacy.

PECAPP (Public Expenditure Analysis and Capacity Strengthening Program) is a program that works in the Public Finance sector and initiated by the World Bank with financial support from AusAID through the CPDA - World Bank.

Keywords: CPDA, World Bank, Consolidating, PECAPP.

Latar Belakang

Penelitian ini akan menganalisa tentang implementasi kerjasama pemerintah NAD dengan Bank Dunia

dalam Program *Consolidating Peaceful Development in Aceh* tahun 2009-2013. Bantuan dari Bank Dunia dalam paket dalam program CPDA kepada Pemerintah NAD adalah

ekspresi solidaritas dan simpati terhadap tsunami dan konflik yang melanda Aceh GAM lalu.

Proses kerja sama antara Pemerintah NAD dengan Bank Dunia dalam program Konsolidasi Pembangunan Damai di Aceh realisasi diwujudkan dengan perencanaan pembangunan bantuan perbaikan dan pengelolaan dana masyarakat dengan prinsip yang memutus siklus kekerasan di wilayah konflik membutuhkan pembangunan dan memiliki legitimasi kelembagaan yang kuat.

Hubungan kerjasama tersebut tidak hanya hubungan kerjasama antar daerah yang bersifat nasional maupun regional saja, melainkan juga bisa dilakukan hubungan kerjasama internasional dengan pihak manca negara, hal itu tercantum dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Hubungan dan Kerjasama Dengan Pihak Luar Negeri.

Bersama dengan program bantuan pemerintah, jumlah bantuan yang belum bisa ditentukan berasal dari masyarakat internasional dengan bantuan untuk rekonstruksi dan pembangunan sebesar AS\$8 milyar. Dengan dukungan bantuan yang besar, pemerintah meminta Bank Dunia untuk membentuk dana dari *Multi Donor Fund* (MDF) sebagai salah satu mekanisme untuk memastikan penyediaan bantuan keuangan yang terkoordinir dan efisien. MDF memberikan kontribusi yang efisien dan efektif terhadap rekonstruksi perbaikan Aceh dan Nias dengan

mengumpulkan sumber donor dan menyediakan forum bagi dialog kebijakan dan koordinasi donor.

Dilihat dari berbagai segi, keadaan sosial di Aceh diluar perkiraan, cukup bagus. Modal sosial umumnya kuat, khususnya dalam kalangan kelompok-kelompok seperti keluarga, teman terdekat, tetangga, dan rekan sekerja. Tingkat kepercayaan dan solidaritas di antara warga desa cukup kuat dan tingkat solidaritas tampaknya bertambah tinggi sejak MoU Helsinki ditandatangani.

Upaya pemulihan Aceh hendaknya dibangun di atas kekuatan propinsi dan kemajuan - kemajuan yang telah dicapai dalam upaya pemulihan. Kebutuhan akan investasi yang berkelanjutan tidaklah mengherankan dan hendaknya dilakukann berdasarkan kemajuan luar biasa yang telah dicapai oleh rakyat Aceh, pemerintah Pusat dan Daerah, dan masyarakat Internasional. Keadaan di sejumlah wilayah sudah jauh lebih baik karena sebagian besar pengungsi konflik dan pengungsi tsunami sudah kembali ke desa asal mereka masing-masing dan banyak yang tinggal di rumah sendiri sekarang. Sebagian besar indikator modal sosial menunjukkan bahwa keadaan sosial cukup bagus. Kesulitan memperoleh layanan publik jarang terjadi karena adanya rasa percaya yang tinggi dan berbagai mekanisme digunakan untuk mengatasi persoalan-persoalan setempat.

Upaya pemulihan berkelanjutan harus berpijak pada kekuatan-kekuatan dengan indikator - indikator yang bagus mengenai modal

sosial dan partisipasi menunjukkan bahwa proses berlandaskan partisipasi masyarakat adalah proses yang paling menjanjikan untuk mewujudkan rencana-rencana pembangunan yang paling responsif terhadap kebutuhan desa. Oleh karena itu, badan-badan pembangunan dan pemerintahan sebaiknya mempertahankan dan mengingatkan prakarsa pembangunan berbasis partisipasi masyarakat desa baik untuk rekonstruksi pasca tsunami maupun reintegrasi pasca konflik.

Pemimpinan setempat tetap merupakan sumber informasi yang penting bagi rakyat Aceh. Mengingat manfaat tambahan dari informasi yang disampaikan melalui tatap muka, hendaknya dilakukan upaya-upaya yang lebih besar untuk memberikan informasi kepada para pemimpin setempat tentang program-program reintegrasi tsunami dan program-program yang berkaitan dengan MoU, untuk membangun kapasitas mereka meneruskan informasi ini kepada warga masyarakat yang mereka wakili. Di sekolah dasar, rasio antara murid dengan guru cukup memadai. Namun, investasi dalam pendidikan sekarang sebaiknya di fokuskan pada prioritas yang telah diidentifikasi untuk meningkatkan mutu dan pengalaman guru secara menyeluruh untuk menyediakan lebih banyak buku pelajaran dan memperbaiki ruang kelas dan sarana

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis dapat menyimpulkan pertanyaan utama dari penelitian ini yaitu “**Bagaimana implementasi**

kerjasama Pemerintah NAD dengan Bank Dunia dalam Program *Consolidating Peaceful Development in Aceh* tahun 2009-2013?”

Tujuan Penelitian

Penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan pengetahuan yang lebih luas kepada masyarakat maupun mahasiswa ilmu hubungan internasional, mengenai bagaimana implementasi kerjasama pemerintah NAD dengan Bank Dunia dalam Program *Consolidating Peaceful Development in Aceh* tahun 2009-2013.

Teori

Untuk mengupas permasalahan yang telah dirumuskan dalam pokok permasalahan berdasarkan latar belakang masalah di atas, dapat dirangkum deskripsi secara ringkas. Hubungan kerjasama antar negara dewasa ini cenderung lebih banyak kesempatan untuk dapat dilaksanakan oleh negara-negara karena situasinya lebih kondusif terutama berkaitan dengan semakin bergesernya isu-isu yang lebih mengedepankan isu ekonomi yang diasumsikan lebih memberikan *value added* yang lebih menguntungkan, dan peluang berperannya aktor non-negara juga lebih memungkinkan di dalamnya, sehingga tidak mengherankan apabila kemudian bermunculan dan terbentuk kerjasama yang bersifat hubungan transnasional.

Kerjasama Pemerintah NAD dengan Bank Dunia dalam program CPDA merupakan bentuk hubungan transnasional karena bersifat lintas

nasional. Terjadi dan terbentuknya kerjasama tersebut sudah tentu dari kedua belah pihak dilandasi pertimbangan dan kepentingan, terutama yang pasti adalah kepentingan nasional, dimana pihak Bank Dunia berkehendak memberikan bantuan kepada Indonesia sesuai dengan misi yang diembannya berupa konsolidasi pembangunan damai, sedangkan Indonesia berkepentingan untuk meningkatkan kebutuhan hidup bagi warga masyarakatnya dalam bidang konsolidasi pembangunan damai di salah satu wilayahnya yaitu Provinsi NAD yang terkena musibah tsunami dan konflik GAM sebagaimana disyaratkan oleh Bank Dunia.

Sementara itu keberadaan dan kedudukan Pemerintah Provinsi NAD dalam kancah kerjasama dengan pihak lembaga non pemerintah dari manca negara tersebut dibenarkan menurut tatanan negara Indonesia yang berpijak pada instrumen hubungan kerjasama luar negeri berdasarkan peraturan perundangundangan maupun ketentuan otonomi daerah yang berlaku, dan berpedoman pada konsep-konsep hubungan internasional.

Hipotesa

Berdasarkan rumusan masalah di atas yaitu “implementasi kerjasama pemerintah NAD dengan Bank Dunia dalam Program *Consolidating Peaceful Development in Aceh* tahun 2009-2013?” dan mengacu pada kerangka teori penulis ajukan, penulis mengajukan hipotesa bahwa Proses kerjasama antara Pemerintah Provinsi NAD dengan Bank Dunia dalam program *Consolidating Peaceful*

Development in Aceh realisasinya diwujudkan dengan pemberian bantuan perbaikan perencanaan pembangunan dan pengelolaan dana publik dengan prinsip bahwa memutuskan siklus kekerasan di wilayah konflik membutuhkan pembangunan kelembagaan yang kokoh dan memiliki legitimasi.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Deskriptif artinya menggambarkan atau menguraikan hasil dari pengamatan (observasi) terhadap gejala, peristiwa dan kondisi aktual, sedangkan kualitatif artinya naratif atau paparan yang secara lahiriah berwujud susunan kata dan kalimat. Objek dalam penelitian ini adalah proses dan realisasi pelaksanaan kerjasama Pemerintah Provinsi NAD dengan Bank Dunia dalam program *Consolidating Peaceful Development in Aceh (CPDA)*.

Rekonstruksi Konflik

Rekonstruksi kerusakan infrastruktur dan rehabilitasi ekonomi di wilayah yang sebelumnya mengalami perang sipil sangat penting baik dari perspektif pembangunan maupun keamanan. Konflik menghancurkan infrastruktur, meningkatkan kemiskinan (meskipun mungkin memperkaya beberapa) dan mempengaruhi penyediaan layanan dasar. Pelarian dana diperparah oleh suspensi investasi ke dalam. Kerusakan di kohesi sosial dan kepercayaan membuatnya bahkan lebih sulit untuk dikembangkan.

Kemiskinan dan kurangnya kesempatan ekonomi, dan diiringi dengan ketidakpercayaan terhadap pemerintah, setelah konflik berakhir. Kesulitan ekonomi kembali mulai setelah konflik berakhir, dan memberikan dividen perdamaian yang nyata yang menunjukkan kemajuan di lapangan setelah konflik berakhir, menurut Bank Dunia, 44 persen dari negara-negara mencapainya dalam waktu lima tahun. Kemajuan ekonomi akan menciptakan lapangan pekerjaan (terutama bagi mantan kombatan) dan membangun kembali infrastruktur publik dan swasta yang rusak dengan demikian kegiatan pencegahan konflik penting setelah perang saudara.

Aceh tidak terkecuali. Konflik menghancurkan kehidupan rakyat Aceh; rekonstruksi ekonomi dan pembangunan sangat penting untuk perdamaian yang berkelanjutan di Aceh. Konflik tiga puluh tahun antara Pemerintah Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) menghasilkan diperkirakan 15.000 kematian, perpindahan lebih dari 100.000, dan trauma mendalam. Studi Bank Dunia menunjukkan dampak ekonomi yang parah dengan rusak nya ribuan rumah. Selama periode 1989-1998, 527 sekolah dibakar dan dihancurkan, dan diperkirakan 880 ditutup karena kerusakan pada semester pertama tahun 2003 setelah runtuhnya Kesepakatan Penghentian Permusuhan. Dua puluh dua persen dari klinik kesehatan desa rusak akibat konflik. Antara 11-20 persen dari semua infrastruktur transportasi di Aceh rusak langsung oleh konflik dan kerusakan yang sama tercatat untuk

infrastruktur air dan listrik. Kurangnya pemeliharaan, berkaitan erat dengan adanya konflik, mengakibatkan kerusakan bahkan lebih.

Rekonstruksi Pasca-Konflik

Kebutuhan di wilayah tsunami dengan bencana skala besar, masuk akal untuk memfokuskan upaya pada daerah-daerah pertama, terutama mengingat kenyataan bahwa konflik masih berlangsung selama delapan bulan setelah tsunami. Banyak lembaga juga merasa bahwa dana mereka terikat. LSM (yang memegang sekitar sepertiga dari dana rekonstruksi tsunami) telah meminta dana dari masyarakat atas dasar bahwa ini akan digunakan untuk tanggap tsunami. Beberapa negara merasa dibatasi agar menggunakan dana mereka untuk wilayah yang terimbas langsung tsunami saja. Pemberian dana dari AS, misalnya, khususnya untuk rekonstruksi tsunami; ia merasa bahwa itu akan diperlukan untuk kembali ke Kongres jika dana ini akan digunakan untuk tujuan lain.

Rekonstruksi Damai

Proses perdamaian telah sangat sukses di Aceh sejauh ini. Lima tahun setelah penandatanganan perjanjian damai Helsinki, Aceh telah berubah dengan keamanan telah membaik. Hal ini telah memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan dan pengentasan kemiskinan di daerah-daerah yang paling terkena dampak selama konflik. Mantan kombatan telah memberikan senjata mereka dan telah diterima dalam komunitas yang mereka telah kembali. Sebagian besar sekarang bekerja. Ketentuan otonomi

khusus sekarang di tempat. Sebagian besar damai eksekutif lokal dan pemilu legislatif membantu memperkuat reintegrasi politik. Elit dan masyarakat terus mendukung perdamaian, dan proses perdamaian yang kuat. Aceh menyediakan model dan pelajaran penting bagi banyak daerah muncul dari konflik, termasuk daerah lain di Indonesia.

Namun, perdamaian abadi tidak dapat diterima begitu saja. Tantangan tetap yang perlu diatasi jika perdamaian dikonsolidasikan dan pengembangan berakar di provinsi tersebut. Secara global, hanya satu setengah dari negara-negara yang keluar dari konflik bersenjata membuatnya melalui sepuluh tahun tanpa kambuh. Dalam beberapa tahun terakhir, telah terjadi peningkatan kekerasan lokal dan kriminalitas di Aceh, akibat kelemahan dalam sistem peradilan informal dan formal. Pengecualian beberapa dari dividen perdamaian pasca-konflik dan rekonstruksi booming pasca tsunami juga menyebabkan ketegangan. Keyakinan dalam pemerintahan, penting untuk perdamaian dan pembangunan berkelanjutan, masih kurang, sebagian karena keterbatasan kapasitas yang telah dihasilkan dari konflik.

CPDA

CPDA dirancang dalam menanggapi pengakuan oleh pemerintah dan donor tentang perlunya pergeseran dari bantuan pasca-konflik langsung dukungan untuk nasional dan lokal guna pengembangan peka konflik. Tujuan strategis dari program

ini adalah untuk memperkuat lembaga-lembaga nasional dan lokal untuk mendukung konsolidasi perdamaian dan pembangunan di Aceh. Tujuan khusus adalah untuk:

1. Membangun kapasitas pemerintah daerah untuk mempromosikan pembangunan damai melalui bantuan teknis dan saran kebijakan secara empiris-ground.
2. Percontohan pendekatan untuk membantu kelompok-kelompok rentan yang menimbulkan risiko keamanan dan / atau yang sangat dipengaruhi oleh konflik untuk nanti skala-up.
3. Meningkatkan kapasitas organisasi penelitian lokal untuk menghasilkan analisis yang membantu panduan pemerintah pembuatan kebijakan untuk pengembangan conflict-sensitive.
4. Mentransfer pelajaran dan pendekatan dari Aceh untuk diterapkan di daerah lain di Indonesia

Elemen Program

Program ini membiayai platform kegiatan yang diprioritaskan setiap tahun oleh Komite Pengarah nya. Platform ini memiliki empat komponen: Membangun kapasitas pemerintah daerah yang damai di Aceh akan memerlukan otoritas lokal yang efektif dan sah. Jika perdamaian untuk dikonsolidasi, pelayanan harus meningkatkan, kepercayaan pada

pemerintah harus meningkatkan, dan dana pemerintah harus digunakan dengan cara yang peka terhadap kebutuhan pasca-konflik khas Aceh dan tantangan. Program ini dapat mendukung pemerintah daerah dalam membuat perencanaan yang lebih peka terhadap konflik, dengan meningkatkan manajemen anggaran, dan melalui perumusan peraturan daerah untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Pemerintahan Aceh, serta melalui kerja ditujukan untuk meningkatkan akses terhadap keadilan dan penguatan kapasitas resolusi konflik lokal.

Berurusan dengan kerentanan pasca-konflik utama di Aceh Proyek ini juga akan membiayai proyek-proyek percontohan untuk mengembangkan model *scalable* untuk menangani kebutuhan kelompok yang rentan terkena dampak konflik, yang tertinggal orang lain dan atau yang hadir (potensial) risiko keamanan. MSR mengidentifikasi tiga kelompok tersebut: 'beresiko' pemuda, baru-baru ini kembali pengungsi, dan perempuan kepala keluarga. Dana dalam komponen ini telah dialokasikan untuk satu atau dua tahun, LSM dieksekusi *Community Rangers Project*, yang akan memberikan pemuda di Aceh dengan pelatihan keterampilan dan pekerjaan sebagai penjaga lingkungan. Proyek ini akan menguji pendekatan inovatif untuk mempromosikan integrasi sosial dan pembangunan ekonomi peka terhadap lingkungan dalam konteks pasca-konflik. Satu hipotesis bahwa proyek mengusulkan untuk menguji adalah bahwa menyediakan penerima dengan

pekerjaan yang melibatkan interaksi yang luas dengan masyarakat, mempromosikan nilai-nilai positif dan cenderung diterjemahkan menjadi keuntungan kolektif, akan mengakibatkan menjadi dividen integrasi sosial yang lebih tinggi daripada program pelatihan dan penciptaan lapangan kerja kejuruan biasa.

CPDA adalah *Multi-Donor Trust Fund Programatik* yang telah ditetapkan oleh Bank Dunia pada bulan Januari 2010 dengan kontribusi keuangan dari Royal Kedutaan Besar Kerajaan Belanda dan *AusAID*. Program ini akan berjalan sampai akhir 2012 Dana terbuka untuk kontribusi tambahan. Program ini dipimpin oleh Komite Pengarah yang terdiri dari perwakilan dari pemerintah nasional dan provinsi, Royal Kedutaan Besar Kerajaan Belanda, AusAID dan Bank Dunia. Bank Dunia, melalui program Konflik dan Pembangunan yang bertindak sebagai Program sekretariat dan mengelola dana tersebut.

Konflik dan Program Pembangunan (C&D), yang bertindak sebagai Sekretariat CPDA ini, didirikan dalam Unit Pengembangan Sosial kantor Bank Dunia di Jakarta pada tahun 2002 C&D Program menyediakan model inovatif untuk mendukung pemerintah pusat dan daerah serta masyarakat sipil dalam mengembangkan pendekatan pengelolaan konflik. Program kunci mitra pemerintah nasional adalah Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). Di tingkat lokal, program ini juga bekerja sama dengan

pemerintah provinsi Aceh. Semua kegiatan dievaluasi dan didokumentasikan, dan pelajaran disebarluaskan dalam maupun di luar Indonesia. Program ini memiliki empat unsur yang saling terkait:

1. Pekerjaan analitis untuk lebih memahami sifat kekerasan di Indonesia dan bagaimana hal itu berkembang. Kegiatan penelitian meliputi unggulan Konflik Kekerasan di Indonesia Studi (VICIS) yang membandingkan kejadian dan dampak kekerasan di seluruh Indonesia bersama dengan faktor-faktor yang membantu menentukan hasil yang berbeda (kekerasan atau perdamaian), pekerjaan lain pada sifat dan biaya dari kekerasan, pemantauan tren konflik, dan penilaian dari interaksi multi-faceted antara proyek-proyek pembangunan dan dinamika konflik lokal.
2. Keterlibatan kebijakan untuk mendukung pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam menggunakan sumber daya mereka sendiri untuk mengatasi dan mengelola konflik secara lebih efektif. Pekerjaan meliputi

dukungan penasehat Bappenas untuk merumuskan strategi pencegahan konflik nasional, dukungan untuk pemerintah nasional dan provinsi untuk pengarusutamaan conflict sensitivity dalam proses pembangunan reguler, dan bantuan teknis kepada pemerintah Aceh.

3. Operasi untuk pilot dan secara empiris menguji pencegahan dan manajemen konflik pendekatan, dan menilai efektivitas dan kesesuaian mereka untuk skala-up oleh pemerintah. Pengiriman kendaraan termasuk proyek Pemerintah Indonesia seperti PNPM-Perdesaan dan SPADA serta proyek-proyek pembangunan lainnya.
4. Kemitraan untuk menjamin keberlanjutan pendekatan berbasis empiris C&D program untuk pengelolaan konflik. Program ini memiliki strategi pengembangan kapasitas aktif yang meningkatkan kemampuan pemerintah, masyarakat sipil dan organisasi

penelitian untuk bekerja pada isu-isu konflik dan pembangunan. Sebagai program C&D berlangsung, berbagi kerja analitis dan penasehat sedang dipindahkan ke lembaga-lembaga nasional.

Ada potensi besar rekonstruksi ekonomi untuk membantu membangun perdamaian di Aceh. Sumber relatif berlimpah. Namun, ada risiko bahwa jika sumber daya ini tidak dikelola dengan baik, justru dapat mengganggu perdamaian dengan tidak adil menargetkan daerah atau kelompok, digunakan untuk investasi yang tidak produktif, atau jika korupsi atau lemahnya kapasitas membatasi dampaknya. Badan-badan bantuan belum memberikan perhatian yang cukup untuk membangun sistem pemerintah daerah untuk mengelola sumber daya pembangunan. Lebih banyak dukungan di daerah ini akan menjadi kunci jika rekonstruksi ekonomi dapat memberikan kontribusi bagi perdamaian konflik di Aceh.

PECAPP (*Publik Expenditure Analysis and Capacity Strengthening Program*)

PECAPP (*Public Expenditure Analysis and Capacity Strengthening Program*) adalah sebuah program yang bekerja pada sektor Keuangan Publik dan diprakarsai oleh Bank Dunia dengan dukungan dana dari AusAid melalui program CPDA – Bank Dunia. Program ini dilaksanakan Universitas Syiah Kuala bekerjasama dengan

beberapa CSO lokal yang bergerak dalam bidang keuangan daerah.¹

Program ini disupervisi langsung oleh Bank Dunia beserta Pemerintah Aceh melalui Komite Pengarah yang ditetapkan berdasarkan SK Gubernur No. 050/498/2012. Anggota Komite Pengarah terdiri dari para Kepala dinas strategis dan diketuai oleh Sekretaris Daerah Provinsi Aceh. Diskusi strategis dengan pemerintah (Tim Anggaran Pemerintah Aceh) dan instansi strategis lainnya juga dilakukan berkala, untuk membahas hasil analisis anggaran beserta isu-isu lain mengenai pengelolaan keuangan publik.

Terdapat tiga komponen utama dari kegiatan PECAPP;

1. Penguatan kapasitas pengelolaan keuangan publik (alokasi dan belanja) dengan menggunakan instrumen analisis belanja publik yang lebih baik. Seri pelatihan terhadap metode analisis belanja publik akan dilakukan dengan sasaran utama adalah staff pemerintahan yang bekerja dalam bidang program atau perencanaan. Pelatihan juga dilakukan terhadap anggota dewan perwakilan rakyat dari komisi dan badan tertentu yang relevan serta kalangan akademisi dan NGO. Beberapa peserta pelatihan

1

<http://belanjapublikaceh.org/about/#sthash.pUpiK0e7.dpuf>

terpilih akan bersama-sama dengan tim PECAPP yang disupervisi Bank Dunia akan menghasilkan analisis belanja publik Aceh yang terkini.

2. Penguatan transparansi dan akuntabilitas melalui penguatan kualitas serta strategi advokasi dan disseminasi dari rekan-rekan CSO. Pelatihan tentang advokasi yang efektif berkenaan dengan isu-isu pengelolaan keuangan daerah juga akan dilaksanakan bekerjasama dengan ICW (*Indonesia Corruption Watch*) dan Formappi (Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia). Disseminasi terhadap hasil-hasil analisis dan seri diskusi berkala mengenai berbagai isu-isu pengelolaan keuangan publik akan dilakukan bersama-sama dengan NGO lokal. Hasil keluaran yang ingin dicapai adalah; advokasi dan pemantauan berkala mengenai belanja publik di Aceh melalui hasil analisis-analisis yang dilakukan oleh akademisi dan universitas. Data-data dan analisis disebarluaskan melalui berbagai media; radio, advertorial, news letter termasuk website.
3. Memasukkan metode analisis belanja publik termasuk komponen materi pada universitas / perguruan tinggi. Untuk menjamin keberlanjutan pengetahuan analisis belanja publik, PECAPP bekerjasama

dengan universitas dalam menyusun kurikulum dan materi pelatihan bagi mahasiswa dan pemerintah lokal.

PECAPP tak hanya melakukan analisis anggaran publik di tingkat Provinsi Aceh, tetapi juga melakukan analisis keuangan publik di dua kabupaten; Kabupaten Pidie Jaya dan Kabupaten Aceh Tengah. Analisis anggaran Kabupaten Pidie Jaya dan Kabupaten Aceh Tengah sudah mulai dilakukan sejak Juli 2013 lalu, analisis yang dilakukan adalah untuk Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten (APBK) 2013. Analisis juga memakai data pembanding APBK 2008 sampai 2012.

Selain melakukan analisis, PECAPP juga mengadakan pelatihan untuk peningkatan kapasitas SDM di Kabupaten Pidie Jaya dan Kabupaten Aceh Tengah. Pelatihan terkait anggaran untuk para pengambil kebijakan di Kabupaten Pidie Jaya dan Kabupaten Aceh Tengah, juga dilakukan analisis bersama. Pelatihan analisa belanja publik ini diharapkan mampu menghasilkan analisis belanja publik di kabupaten/kota, yang mampu melakukan perencanaan dan kajian terhadap anggaran publik di daerahnya pada masa mendatang. Dengan harapan untuk menghasilkan sebuah perencanaan yang baik dalam penyusunan anggaran ke depan serta PECAPP diharapkan juga dapat mengambil peranan dalam membangun kembali Aceh Tengah pasca-gempa gayo, 2 Juli 2013 lalu. Gempa telah mengakibatkan puluhan

ribu rumah, ribuan sekolah dan fasilitas pemerintah lainnya hancur.

Public Expenditure Analysis and Capacity Strengthening Program (PECAPP) masuk kampus, dengan mengajak mahasiswa untuk lebih peduli anggaran. Mahasiswa diharapkan dapat mengambil peran dalam pengawasan dana publik. Diskusi kumpul kampus pertama kali diadakan dengan tema “Peran Mahasiswa Mengawal Dana Kesehatan” yang dibahani oleh Peneliti PECAPP, dr Rachmad Suhandi. Digelar di kantor ICAIOS, Universitas Syiah Kuala (Unsyiah), Sabtu 26 Oktober 2013.² Bertema kesehatan, diskusi lebih banyak dihadiri oleh mahasiswa Fakultas Kedokteran dan Akademi Keperawatan. Juga hadir mahasiswa dari Fakultas Hukum dan perwakilan Pemerintah Mahasiswa Unsyiah. Kumpul kampus rencananya juga akan digelar kembali di Unsyiah bersama mahasiswa hukum terkait regulasi di Aceh, mahasiswa ekonomi terkait anggaran berbagai sektor riil dan mahasiswa kependidikan untuk masalah anggaran sektor pendidikan. Selain di Unsyiah, PECAPP juga akan masuk ke beberapa kampus lainnya di Aceh.

Perencanaan anggaran yang belum efektif, sehingga aparat Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah diharapkan serius mengikuti pelatihan yang dilaksanakan *Public Expenditure Analysis and Capacity Strengthening*

² <http://belanjapublikaceh.org/news/pecapp-ajak-mahasiswa-mengawal-anggaran/>

Program (PECAPP), bersama Universitas Syiah Kuala dan Pemerintah Aceh. Tantangan utama menghasilkan belanja publik yang efektif dan efisien adalah sering terjadi ketidaksinkronan antara prioritas pembangunan dengan proses perencanaan dan pelaksanaan anggaran.

Public Expenditure Analysis and Capacity Strengthening Program (PECAPP), bersama Universitas Syiah Kuala dan Pemerintah Aceh melaksanakan pelatihan analisis belanja publik untuk pegawai pemerintah Aceh Tengah. Acara dimulai 23 September 2013 yang berlangsung selama tiga hari. Pelatihan diikuti oleh 20-an staf pemerintah yang berasal dari bidang program atau perencanaan instansi strategis seperti Bappeda, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Pengelolaan Keuangan Kabupaten dan Inspektorat.

PKP (Pengelolaan Keuangan Publik)

Status otonomi khusus Aceh telah memberikan propinsi ini persentase sumber daya keuangan yang bahkan lebih besar lagi bagi pemerintah daerah. Ketiadaan informasi yang sistematis baik kualitatif maupun kuantitatif mengenai bagaimana desentralisasi fiskal ini dikelola oleh kabupaten telah menjadi pemicu untuk mengembangkan kerangka pengukuran untuk pemerintah daerah di Indonesia.

Kerangka PKP merupakan salah satu dari empat pilar kerangka pengukuran pemerintah daerah. Pilar-

pilar lainnya adalah pemberian layanan publik, iklim investasi, dan kesehatan fiskal. Dengan mengukur kinerja dalam empat bidang utama ini, penilaian yang sistematis terhadap kinerja pemerintah daerah dapat dilakukan.

Untuk Aceh, kapasitas pengelolaan keuangan yang efektif di tingkat pemerintah daerah penting untuk pencapaian tujuan-tujuan pembangunan jangka panjang. Beberapa faktor telah membatasi kapasitas pengelolaan keuangan di Aceh. Pertama, desentralisasi yang dilakukan secara cepat di Indonesia yang merupakan pengalihan tanggung jawab fiskal dan penyerahan sumber daya keuangan kepada pemerintah daerah tidak diikuti oleh peningkatan kapasitas pemerintah daerah dalam mengelola sumber daya tersebut. Mengingat sebelum desentralisasi tugas utama pemerintah daerah hanyalah menjalankan prioritas pembangunan pemerintah pusat, sistem pengelolaan keuangan tidak dirancang untuk mengatasi perubahan pengaturan fiskal. Kedua, Aceh telah mengalami peningkatan jumlah pemerintah daerah sejak tahun 2000. Sampai bulan November 2006, dari 21 pemerintah daerah yang ada, 11 diantaranya dibentuk setelah tahun 2000. Walaupun hal ini tidak serta merta berarti kapasitas pengelolaan keuangan akan selalu lebih rendah pada pemerintah daerah yang baru dibentuk, hasil dari survei PKP mengindikasikan bahwa, secara rata-rata, hasil pengelolaan keuangan lebih

rendah pada pemerintah daerah yang baru.

Kesimpulan

Koordinasi yang kuat merupakan faktor penentu keberhasilan dalam upaya rekonstruksi apapun. Pemerintah Indonesia memimpin koordinasi donor, mitra dan pemangku kepentingan lainnya dalam upaya rekonstruksi \$ 7000000000 secara keseluruhan. Pelajaran dari acara rekonstruksi Indonesia yang jelas peran dan komitmen yang kuat dari berbagai mitra rekonstruksi dan pemerintah sangat penting untuk proses koordinasi dan rekonstruksi. Tutup komunikasi antara semua pihak adalah kunci untuk mencegah duplikasi usaha dan identifikasi kegiatan tanggap. Delegasi pengambilan keputusan kewenangan untuk kantor lokal mempercepat implementasi.

Sebuah hubungan kerja yang kuat dengan pemerintah juga penting untuk respon berhasil mengkoordinir. CPDA memfasilitasi peran koordinasi pemerintah seperti yang diberikan lembaga tunggal untuk bekerja dengan dalam hal desain program, pengembangan proyek, pelaksanaan dan pengadaan terkait. Portofolio infrastruktur CPDA dirancang dalam koordinasi yang erat dengan Pemerintah Indonesia, dan terutama digunakan untuk mengisi kesenjangan dalam kegiatan rekonstruksi infrastruktur secara keseluruhan. CPDA mengalokasikan sekitar \$ 290.000.000 untuk rekonstruksi infrastruktur, dan pemerintah

menyediakan dana pendamping dari lebih dari \$ 100 juta. Sebagian besar dana ini disalurkan melalui anggaran pemerintah, memberikan pemerintah rasa kepemilikan yang kuat atas investasi dan memberikan kontribusi untuk sukses.

Sangat penting bahwa struktur manajemen program rekonstruksi memiliki kewenangan yang diperlukan dan fleksibilitas untuk melakukan penyesuaian yang diperlukan untuk konsep proyek. Merupakan menyesuaikan ruang lingkup dan cakupan investasi, mengingat bahwa rencana proyek awal seringkali didasarkan pada informasi yang tidak pasti, serta menggunakan opsi pengadaan fleksibel. Sebuah kehadiran yang kuat di situs dan tingkat tinggi otoritas pengambilan keputusan didelegasikan sangat penting dalam konteks ini untuk mempercepat implementasi.

Upaya peningkatan mutu pendidikan hendaknya menjadi fokus utama dalam pembangunan tahun mendatang (RENSTRA 2013 – 2017). Dengan fokus untuk lebih meningkatkan alokasi belanja untuk peningkatan mutu guru dan siswa. Selanjutnya, Pemerintah Aceh dapat mengalokasikan dana pendidikan secara efektif sesuai dengan kebutuhan berdasarkan basis analisis yang kuat terhadap data dan fakta di lapangan. Target-target pembangunan pendidikan dilaksanakan sesuai dengan setting prioritas. Misalnya, tidak membangun lagi ruang kelas baru, tetapi menambah laboratorium dan pustaka untuk meningkatkan kelulusan siswa.

Analisis PECAPP telah sepenuhnya menggambarkan tantangan pendidikan yang dihadapi Aceh selama ini, khususnya dalam bidang mutu pendidikan. Tahun ini, Pemerintah Aceh telah mengalokasikan anggaran yang lebih besar terhadap program-program peningkatan mutu pendidikan, terutamanya terhadap peningkatan kompetensi guru. Di dalam renstra pendidikan (2013-2017) yang sedang disusun, pemerintah terus memberikan perhatian yang besar terhadap peningkatan mutu pendidikan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Anak Agung Banyu Perwita dan Yanyau Mohamad Yani, *Pengantar Hubungan Internasional*, Remaja Rosda Karya, Bandung, 2005, Hal.92.
- Departemen Luar Negeri republik Indonesia 2006. *Panduan Umum Tata Cara Hubungan dan Kerjasama Luar Negeri oleh Pemerintah Darrah Revisi Tahun 2006*.
- Hans J Mprgenthau, *Politics Among Nations*, dalam bukunya Mochtar Mas'oe'd, *Ibid*, hlm 18.
- K.J. Holsti, *Politik Internasional Kerangka Untuk Analisis*, hlm 209.
- Mochtar Mas'oe'd. *Ilmu Hubungan Internasional, Disiplin dan Metodologi*, Penerbit LP3ES, Jakarta, 1994, hlm 232.
- S.L. Roy, *Diplomacy*, Alih Bahasa Harwanto dan Mirsawati,

- Penerbit Grafindo Persada, Jakarta, 1995, hlm 31.
- Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, hlm 139.
- Undang-undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang *Hubungan Luar Negeri*.
- Undang-undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang *Pemerintah Daerah*, hlm 6
- United States Institute of Peace. The Aceh Peace Process. 2007*
- World Bank. Cost of Conflict in Aceh.*
- _____. *Estimating Aceh's Cost of Conflict.*
- _____. *Evaluasi Keadaan Prasarana dan Sosial Desa*, hal 92. Program Pengembangan Kecamatan.
- _____. *GAM Reintegration Needs Assessment*. Hal. 2. *Assessment Methodology*.
- _____. *Multi-Stakholder*. Hal. 11. *Aceh Reintegration and Livelihood Surveys (ARLS)*.
- _____. *Note on Conflict Intensity Index*.

Jurnal Dan Artikel

Jurnal Transnasional, Vol. 3, No. 2, Februari 2012.

Website

<http://www.belanjapublikaceh.org/>

<http://documents.worldbank.org/>

<http://usip.org/>

<http://www.worldbank.org/>